

Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Kepatuhan Pajak: Studi Kuantitatif Berdasarkan WVS Indonesia Tahun 2018

Mely Agustina ^{*1}
Nandya Artha Dyanti ²
Gitara Dhea Pramudita ³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia

*e-mail: mellya920@gmail.com¹, nandyarthadyanti@gmail.com², pramuditagitara90@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia, dengan memanfaatkan data Survei Nilai Dunia (World Values Survey/WVS) tahun 2018. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi logistik ordinal untuk menilai hubungan antara variabel sikap terhadap kepatuhan pajak dan sejumlah variabel prediktor, termasuk kepercayaan terhadap pemerintah serta faktor sosial-demografis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, usia responden, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, pendapatan, kepercayaan terhadap sesama, dan karakteristik wilayah tempat tinggal tidak menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan aspek penting dalam membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan untuk memperkuat legitimasi fiskal di mata masyarakat.

Kata kunci: Indonesia, Kepercayaan Pemerintah, Kepatuhan Pajak, Regresi Logistik Ordinal, WVS

Abstract

This research explores the extent to which public trust in government influences tax compliance in Indonesia, drawing upon data from the 2018 World Values Survey (WVS). Employing a quantitative approach, the study applies ordinal logistic regression to evaluate the association between tax compliance attitudes and various predictors, including institutional trust and socio-demographic variables. The findings indicate that trust in government, age, educational attainment, and gender significantly affect individual tax compliance. Conversely, income level, interpersonal trust, and residential characteristics do not exhibit significant associations. These results underscore the pivotal role of governmental trust in shaping compliant tax behavior. Policy implications suggest that improving institutional transparency and accountability may strengthen the perceived legitimacy of the tax system.

Keywords: Government Trust, Indonesia, Ordinal Logistic Regression, Tax Compliance, World Values Survey

PENDAHULUAN

Dalam sistem fiskal modern, pajak berfungsi sebagai landasan pendanaan negara yang mendukung penyaluran kesejahteraan, pemberian layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia masih menghadapi kendala yang cukup berarti dalam upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 10,31%, mengalami penurunan dibandingkan 10,39% pada tahun sebelumnya dan masih jauh di bawah target rasional minimal sebesar 15% yang direkomendasikan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD, 2022; Kementerian Keuangan RI, 2024). Rendahnya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak merupakan masalah struktural dalam sistem perpajakan nasional yang menjadi penyebab utama ketimpangan antara potensi penerimaan dan realisasinya.

Menurut teori, unsur psikologis dan sosial, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, juga memiliki dampak terhadap perilaku kepatuhan pajak di samping variabel ekonomi seperti tarif dan denda. Membangun sistem pajak yang fungsional membutuhkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah, yang

merupakan cerminan bagaimana masyarakat memandang legitimasi, tanggung jawab, dan integritas pemerintah (Torgler, 2007; Alm et al., 2019). Masyarakat cenderung lebih bersedia membayar pajak ketika mereka merasa pemerintah menanganinya dengan jujur dan benar (Kasipillai & Abdul Jabbar, 2006).

Dalam menjelaskan kepatuhan pajak, pendekatan ekonomi konvensional yang menekankan pada pengaruh tarif pajak dan sanksi sering kali dianggap tidak mencukupi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi, seperti kepercayaan terhadap institusi pemerintah, turut memainkan peran penting dalam membentuk perilaku fiskal individu. Dalam hal ini, teori kontrak sosial menjadi fondasi konseptual yang relevan. Teori ini menyatakan bahwa kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari perjanjian implisit antara warga negara dan negara. Ketika individu percaya bahwa pemerintah menggunakan dana publik secara jujur, transparan, dan adil, mereka lebih cenderung memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika pemerintah dianggap tidak menepati janji sosial tersebut, kepercayaan pun melemah dan kepatuhan pajak menurun (Levi, 1988).

Sejalan dengan itu, teori tindakan kolektif (Olson, 1965) menyoroti bahwa pembayaran pajak adalah bentuk kontribusi terhadap barang publik, yang hanya efektif jika terdapat keyakinan bahwa semua pihak turut serta dan bahwa negara bertindak sebagai pengelola yang dapat dipercaya. Tanpa adanya kepercayaan terhadap sistem dan sesama warga negara, muncul insentif untuk menghindari kontribusi dan menjadi free-rider. Hal ini memperkuat pentingnya kepercayaan institusional dalam menciptakan kepatuhan fiskal yang berkelanjutan. Kerangka Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008) menggabungkan dua dimensi penting dalam memahami kepatuhan pajak: otoritas koersif dan kepercayaan terhadap otoritas fiskal. Model ini menekankan bahwa kepatuhan tidak semata-mata bergantung pada ancaman sanksi, melainkan juga pada sejauh mana individu merasa bahwa otoritas pajak memiliki niat baik, bersikap adil, dan bertindak sesuai kepentingan publik.

Di Indonesia kepercayaan terhadap pemerintah sangat penting mengingat banyaknya faktor sosial politik yang memengaruhi opini publik, termasuk skandal korupsi, distribusi manfaat pembangunan yang tidak merata, dan inefisiensi birokrasi. Dalam beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berhubungan positif dengan kepercayaan pemerintah. Penelitian oleh Zainudin, Nugroho, dan Muamarah (2022) yang menggunakan pendekatan struktural menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak melalui mediasi persepsi keadilan sistem perpajakan. Demikian pula, Toniarta dan Merkusiwati (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali. Dalam lingkup global, Alm dan Torgler (2011) menegaskan bahwa trust-based compliance model menjadi pendekatan penting dalam kebijakan perpajakan di negara-negara OECD.

Meskipun demikian, beberapa penelitian menghasilkan temuan yang saling bertentangan. Menurut Purnamasari dkk. (2017), tergantung pada bagaimana faktor-faktor lain seperti tingkat pengetahuan dan pengalaman wajib pajak berinteraksi, kepercayaan pada pemerintah tidak selalu memiliki dampak besar pada kepatuhan pajak dalam konteks lokal. Selain itu, sebagian besar penelitian terkini di Indonesia masih terbatas pada tingkat daerah atau organisasi tertentu, seperti KPP Pratama, dan belum mencerminkan situasi di tingkat nasional secara komprehensif.

Penelitian ini berupaya untuk menutup kesenjangan tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data nasional yang memungkinkan pemeriksaan hubungan antara kepatuhan pajak individu dan kepercayaan pemerintah menggunakan data dari Survei Nilai Dunia (WVS) Indonesia tahun 2018. Metode ini penting karena WVS menilai sikap dan persepsi sosial masyarakat secara luas, termasuk pendapat mereka tentang perlunya membayar pajak dan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga pemerintah.

Dengan menggunakan variabel sosial ekonomi dan demografi sebagai variabel kontrol, penelitian ini berupaya untuk memeriksa bagaimana kepatuhan pajak di Indonesia dipengaruhi oleh kepercayaan publik terhadap pemerintah. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memajukan pengetahuan dalam ilmu ekonomi kelembagaan secara teoritis dan membantu dalam pembuatan kebijakan fiskal yang didasarkan pada kepercayaan publik.

METODE**Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari *World Values Survey* (WVS) gelombang ke-7 tahun 2018 untuk Indonesia. Unit analisis adalah individu dewasa (berusia ≥ 18 tahun) yang menjadi responden survei. Jumlah sampel yang digunakan adalah 3.200 orang responden yang memiliki data lengkap untuk seluruh variabel penelitian.

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah kuantitatif non-eksperimental dengan pendekatan asosiatif, bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap tingkat kepatuhan pajak individu. Pendekatan yang digunakan adalah *cross-sectional study*, karena data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu (tahun 2018).

Model analisis menggunakan regresi logistik ordinal (ordinal logistic regression) karena variabel dependen (kepatuhan pajak) berskala ordinal dengan 10 tingkat penilaian. Model matematis umum yang digunakan adalah:

$$\log \left(\frac{P(Y \leq j)}{P(Y > j)} \right) = \theta_j - (\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k)$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen (kepatuhan pajak/justifikasi penghindaran pajak, Q180)

j : Ambang batas kategori ordinal pada Y (1-10)

θ_j : Parameter ambang batas (threshold)

X_k : Variabel bebas (misalnya: kepercayaan terhadap pemerintah, pendidikan, religiusitas, dsb.)

β_k : koefisien regresi masing-masing variabel X_k

Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dari database *World Values Survey* (<https://www.worldvaluessurvey.org>), menggunakan dataset WVS Indonesia 2018. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur kepada individu rumah tangga yang dipilih secara acak berstrata (Stratified random sampling). Peneliti melakukan *data cleaning* dan transformasi variabel sesuai kebutuhan analisis.

Variabel Penelitian dan Operasionalisasi**Variabel Dependen**

Kepatuhan Pajak (Q180) - Tingkat justifikasi atas perilaku penghindaran pajak, dinilai pada skala ordinal dari 1 (tidak bisa dibenarkan sama sekali) hingga 10 (selalu bisa dibenarkan). Semakin tinggi skor, semakin permisif responden terhadap penghindaran pajak (semakin tidak patuh).

Variabel Independen Utama

Kepercayaan terhadap Pemerintah (Q57_DUMMY) - Dummy variable, dengan nilai 1 jika responden menyatakan "percaya", dan 0 jika "tidak percaya".

Variabel Kontrol

- **Religiusitas (Q71_REV)**: Transformasi dari variabel Q71 menjadi $Q71_REV = 5 - Q71$. Nilai yang lebih rendah menunjukkan semakin seringnya seseorang berdoa/beribadah.
- **Kepercayaan Sosial (Q113)**: Dummy variable, 1 jika "kebanyakan orang bisa dipercaya", 0 jika "harus berhati-hati".
- **Moralitas Umum (Q112)**: Penilaian terhadap moralitas tindakan lain, digunakan sebagai indikator sikap etika umum.
- **Tingkat Pendidikan (Q275)**: Skala ordinal berdasarkan jenjang pendidikan terakhir.
- **Jenis Kelamin (Q260_DUMMY)**: Dummy variable, 1 = laki-laki, 0 = perempuan.
- **Umur (Q262)**: Usia responden dalam satuan tahun.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan software IBM SPSS Statistics versi 26. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Pengkodean dan transformasi variabel, termasuk pengubahan skala ordinal dan pembuatan dummy.
2. Pengujian model regresi logistik ordinal, dengan uji kelayakan model melalui:
 - Nilai -2 Log Likelihood
 - Uji Chi-square untuk signifikansi model
3. Estimasi parameter regresi menggunakan Maximum Likelihood Estimation (MLE).
4. Uji signifikansi individual variabel menggunakan Uji Wald ($\alpha = 5\%$).
5. Interpretasi koefisien dilakukan berdasarkan arah dan kekuatan pengaruh terhadap kecenderungan kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak.

Model dievaluasi menggunakan nilai Pseudo R-Square (Cox and Snell, Nagelkerke, McFadden) untuk menilai kekuatan prediktif model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Ordinal Logistik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah serta sejumlah variabel demografis dan sosial terhadap kepatuhan pajak masyarakat Indonesia berdasarkan data *World Values Survey (WVS)* tahun 2018. Analisis dilakukan menggunakan regresi ordinal dengan variabel dependen “Kepatuhan Pajak” yang telah direverse dari item Q71 (sehingga semakin tinggi nilainya mencerminkan kepatuhan yang lebih besar). Hasil pengolahan data ditampilkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Regresi Ordinal Kepatuhan Pajak

Variabel Independen	Koefisien	Std. Error	Nilai z	Signifikansi (p)
Kepercayaan terhadap Pemerintah (Q71_REV)	-0.104	0.045	-2.319	0.020*
Pendapatan Responden (Q113)	0.033	0.045	0.750	0.453
Usia Responden (Q112)	-0.040	0.014	-2.872	0.004**
Pendidikan Terakhir (Q275)	-0.176	0.048	-3.656	0.000***
Ukuran Tempat Tinggal (Q262)	-0.005	0.003	-1.780	0.074†
Jenis Kelamin (Q260_DUMMY)	-0.164	0.071	-2.317	0.020*
Kepercayaan Sosial (Q57_DUMMY)	-0.213	0.154	-1.379	0.165

Sumber : Output SPSS, diolah 2025

Keterangan:

***p < 0.01; **p < 0.05; *p < 0.10; †p mendekati signifikan

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, yakni: kepercayaan terhadap pemerintah (p = 0.020), usia (p = 0.004), pendidikan (p = 0.000), dan jenis kelamin (p = 0.020). Sedangkan variabel pendapatan, ukuran tempat tinggal, dan kepercayaan sosial tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak.

Uji Kelayakan Model

Model Fitting Information

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	8751.854			
Final	8667.025	84.829	7	<.001

Link function: Logit.

Gambar 1 Uji Kelayakan Model

Dari hasil model regresi ordinal dinyatakan layak berdasarkan uji *Model Fitting Information*, yang menunjukkan nilai Chi-Square sebesar 84,829 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05). Ini menandakan bahwa model dengan prediktor lebih baik secara statistik dibandingkan model tanpa prediktor (*intercept only*).

Kesesuaian Model (Goodness-of-Fit)**Goodness-of-Fit**

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	28176.055	26113	<.001
Deviance	8250.021	26113	1.000

Link function: Logit.

Gambar 2 Kesesuaian Model

Nilai *Deviance* memiliki signifikansi sebesar 1,000, menandakan bahwa model sesuai dengan data. Meski nilai *Pearson Chi-Square* signifikan, hasil ini tetap dapat diterima karena *Deviance* lebih stabil dan menjadi indikator yang lebih utama dalam regresi ordinal (Liu et al., 2017).

Nilai Pseudo R-Square

Model memiliki nilai Nagelkerke R^2 sebesar 0,028, menunjukkan bahwa variabel-variabel independen hanya menjelaskan sekitar 2,8% variasi kepatuhan pajak. Ini sejalan dengan pandangan bahwa kepatuhan pajak sangat kompleks dan dipengaruhi banyak faktor psikologis, sosial, dan institusional (Torgler & Schneider, 2009).

Pseudo R-Square

Cox and Snell	.026
Nagelkerke	.028
McFadden	.009

Link function: Logit.

Gambar 3 Nilai Pseudo R-Square**Pembahasan****Kepercayaan terhadap Pemerintah (Q71_rev)**

Koefisien negatif sebesar -0.104 dengan signifikansi pada taraf 5% menunjukkan bahwa semakin rendah kepercayaan seseorang terhadap pemerintah, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut tidak mematuhi kewajiban pajaknya. Hal ini memperkuat argumen bahwa legitimasi pemerintah dan persepsi masyarakat terhadap otoritas fiskal sangat krusial dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Temuan ini konsisten dengan kerangka *Slippery Slope Framework* yang dikembangkan oleh Kirchler et al. (2008), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya didorong oleh kekuatan otoritatif negara (coercive power), tetapi juga oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap niat baik otoritas pajak (trust in authorities).

Xu et al. (2022) dalam penelitiannya di *Journal of Public Economics* menunjukkan bahwa transparansi fiskal, akuntabilitas anggaran, serta persepsi publik terhadap efektivitas belanja negara sangat memengaruhi niat individu untuk patuh pajak. Di konteks Indonesia, ketika masyarakat merasa dana publik disalahgunakan atau tidak digunakan secara adil, keinginan untuk membayar pajak dapat berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak seharusnya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, melainkan juga pada penguatan kepercayaan melalui transparansi dan reformasi kelembagaan.

Usia Responden (Q112)

Hasil regresi menunjukkan bahwa usia memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan koefisien -0.040 ($p = 0.004$). Ini mengindikasikan bahwa semakin tua usia individu, maka kemungkinan untuk patuh terhadap pembayaran pajak cenderung menurun. Hasil ini cukup mengejutkan karena sering diasumsikan bahwa individu yang lebih tua akan lebih konservatif dan taat hukum. Namun, beberapa penelitian seperti D'Attoma et al. (2021) menunjukkan bahwa warga lanjut usia lebih mungkin merasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah, terutama jika mereka merasa tidak mendapat manfaat langsung dari sistem fiskal.

Secara psikososial, individu berusia lanjut juga cenderung memiliki ingatan historis terhadap ketidakadilan atau korupsi masa lalu, yang kemudian membentuk sikap skeptis terhadap pemerintah saat ini. Dengan demikian, usia bukan hanya variabel demografis, tetapi juga penanda dari konstruksi pengalaman dan persepsi politik yang kompleks.

Pendidikan Terakhir (Q275)

Tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh negatif yang sangat signifikan ($p = 0.000$), dengan koefisien -0.176 . Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, justru kecenderungannya untuk patuh pajak menurun. Penjelasan terhadap fenomena ini dapat ditemukan dalam penelitian Richardson (2006) yang menyatakan bahwa individu berpendidikan tinggi lebih mampu memahami celah hukum (loopholes) dan memiliki akses terhadap strategi penghindaran pajak (tax avoidance). Mereka juga lebih kritis terhadap kualitas layanan publik dan sering kali memiliki persepsi negatif terhadap efisiensi pemerintah.

Penelitian terbaru oleh Hofmann et al. (2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan pengetahuan tentang sistem perpajakan, tetapi tidak selalu berbanding lurus dengan moral pajak. Ketika persepsi terhadap keadilan pajak rendah, individu berpendidikan tinggi justru lebih terdorong untuk menghindari pajak secara legal.

Jenis Kelamin (Q260_DUMMY)

Variabel dummy jenis kelamin menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.164 dengan signifikansi 0.020 , mengindikasikan bahwa laki-laki cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dibanding perempuan. Temuan ini sejalan dengan literatur seperti Torgler dan Valev (2010) yang menemukan bahwa perempuan lebih cenderung mematuhi hukum dan memiliki sensitivitas sosial yang lebih tinggi terhadap norma kolektif.

Penelitian Gangl et al. (2022) juga menunjukkan bahwa perempuan lebih responsif terhadap pendekatan berbasis kepercayaan dan penghargaan moral dibanding laki-laki, yang lebih responsif terhadap insentif ekonomi atau ancaman hukuman. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam desain kampanye fiskal berbasis gender.

Ukuran Tempat Tinggal (Q262)

Ukuran tempat tinggal menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.005 , meskipun tidak signifikan secara statistik ($p = 0.074$). Nilai ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa individu yang tinggal di daerah urban memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori disintegrasi sosial di wilayah urban, di mana norma kolektif dan kontrol sosial informal cenderung melemah. Penelitian oleh Schaltegger et al. (2022)

membuktikan bahwa tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi di daerah rural yang memiliki ikatan komunitas lebih kuat.

Pendapatan Responden (Q113)

Pendapatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak (koefisien = 0.033, $p = 0.453$). Hal ini sejalan dengan temuan Alm dan Torgler (2006) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan bukan satu-satunya penentu utama dalam perilaku fiskal. Faktor-faktor psikologis seperti moral pajak, kepercayaan terhadap otoritas, serta persepsi keadilan lebih dominan dibanding pertimbangan finansial murni.

Kepercayaan Sosial (Q57_Dummy)

Variabel kepercayaan sosial juga tidak signifikan (koefisien = -0.213, $p = 0.165$). Ini memperkuat argumen Feld dan Frey (2007) yang menekankan bahwa yang paling memengaruhi kepatuhan pajak bukanlah kepercayaan terhadap sesama warga negara, melainkan kepercayaan terhadap institusi negara. Dengan kata lain, solidaritas sosial tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan fiskal jika tidak disertai legitimasi institusional.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, data yang digunakan bersifat cross-sectional dari survei *World Values Survey* tahun 2018, sehingga hanya mampu menangkap hubungan asosiatif pada satu titik waktu tertentu dan tidak memungkinkan penarikan kesimpulan kausalitas antar variabel. Kedua, variabel dependen yang digunakan merupakan ukuran persepsi individu terhadap kepatuhan pajak, bukan representasi dari perilaku aktual seperti data pembayaran pajak atau kepatuhan administratif, sehingga dapat menimbulkan bias persepsi. Ketiga, keterbatasan variabel dalam dataset membuat konstruk penting seperti moral pajak, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, dan efektivitas pelayanan publik tidak dapat dimasukkan secara langsung ke dalam model. Selain itu, terdapat kemungkinan bias dari variabel penting yang tidak dimasukkan (*omitted variable bias*), seperti afiliasi politik, pengalaman pribadi dengan birokrasi pajak, atau informasi tentang kebijakan fiskal yang bisa memengaruhi preferensi individu dalam membayar pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sebaiknya diinterpretasikan dengan hati-hati dalam konteks keterbatasan data dan desain penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia, yang berarti semakin tinggi kepercayaan terhadap pemerintah, semakin besar kemungkinan individu untuk patuh dalam membayar pajak. Selain itu, usia, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan arah dan implikasi yang beragam. Di sisi lain, variabel pendapatan, kepercayaan sosial, dan ukuran tempat tinggal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kelebihan dari penelitian ini adalah penggunaan data *World Values Survey* (WVS) tahun 2018 yang representatif secara nasional dan analisis regresi ordinal yang sesuai dengan karakteristik data dependen. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data cross-sectional, sehingga tidak mampu menangkap perubahan perilaku individu dari waktu ke waktu. Selain itu, terbatasnya variabel psikologis dan institusional lainnya dalam data juga membatasi ruang analisis. Ke depan, studi lanjutan dapat mengeksplorasi pendekatan longitudinal atau mixed-method untuk mengkaji dinamika kepatuhan pajak serta mempertimbangkan peran moral pajak, persepsi efektivitas layanan publik, dan interaksi antar individu dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Alm, J., Bloomquist, K. M., & McKee, M. (2019). When you know your neighbor pays taxes: Information, peer effects, and tax compliance. *Fiscal Studies*, 40(4), 515–546. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12182>
- D’Attoma, J., Stegmueller, D., & Hart, A. (2021). How do different types of trust affect tax morale? *Journal of European Public Policy*, 28(3), 367–386. <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1712451>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102–120. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00248.x>
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2022). Gender differences in tax behavior: Social norms, trust, and enforcement. *Journal of Economic Psychology*, 88, 102447. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2021.102447>
- Hofmann, E., Gangl, K., Kirchler, E., & Stark, J. (2023). Who avoids taxes and why? Exploring the interplay of knowledge, morality, and opportunity. *International Tax and Public Finance*, 30(2), 241–262. <https://doi.org/10.1007/s10797-022-09713-6>
- Kasipillai, J., & Abdul Jabbar, H. (2006). Gender and ethnicity differences in tax compliance. *Asian Academy of Management Journal*, 11(2), 73–88. <http://web.usm.my/aamj/11.2.2006/AAMJ%2011-2-5.pdf>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Kinerja Fiskal Nasional Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Levi, M. (1988). *Of rule and revenue*. University of California Press.
- Liu, X., Clogg, C. C., & Powers, D. A. (2017). Ordinal logistic regression. In *Sage Quantitative Applications in the Social Sciences* (2nd ed.).
- Olson, M. (1965). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Harvard University Press.
- Purnamasari, D., Harli, S., & Widodo, W. (2017). Analisis pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah, pengetahuan pajak, dan pengalaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(4), 1–20.
- Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 150–169. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2006.08.005>
- Schaltegger, C. A., Torgler, B., & Schneider, F. (2022). Urbanization and tax morale: New evidence from cross-country data. *Public Finance Review*, 50(2), 239–272. <https://doi.org/10.1177/1091142121994751>
- Toniarta, G. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah dan religiusitas terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 75–88.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy. *Journal of Economic Psychology*, 30(2), 228–245. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.08.002>
- Torgler, B., & Valev, N. T. (2010). Gender and public attitudes toward corruption and tax evasion. *Contemporary Economic Policy*, 28(4), 554–568. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7287.2009.00188.x>

- World Values Survey Association. (2018). World Values Survey Wave 7: Country-Pooled Datafile. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. Retrieved from <http://www.worldvaluessurvey.org>
- Xu, J., Zhang, H., & Alm, J. (2020). Trust, tax morale, and compliance: Evidence from China. *Economic Modelling*, 89, 105–122. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.10.011>
- Zainudin, M. Z., Nugroho, I., & Muamarah, M. (2022). Peran kepercayaan pada pemerintah dalam membentuk persepsi keadilan pajak dan kepatuhan fiskal. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan Indonesia*, 4(2), 115–130.